

EXECUTIVE SUMMARY

PRA – STUDI KELAYAKAN MENCIPTAKAN KAMPUNG DAUR ULANG DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

1. Latar Belakang Masalah

Kondisi kampung/desa di Sumatera Utara umumnya masih menunjukkan kondisi yang belum sejahtera. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat kampung/desa adalah bertani, nelayan, berjualan hasil pertanian/perikanan, buruh bangunan, asisten rumah tangga, buruh pabrik, serta pekerjaan lainnya yang seringkali tidak menuntut pendidikan tinggi. Rendahnya pendidikan masyarakat di desa, selain karena persoalan biaya, juga fasilitas pendidikan yang belum lengkap di desa.

Selain fasilitas pendidikan, fasilitas desa lainnya juga biasanya belum selengkap fasilitas yang di kota, seperti kesehatan, transportasi dan infrastruktur. Minimnya fasilitas – fasilitas umum yang terdapat di desa, sangat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat desa yang masih sangat sederhana ini. Karena selain berpengaruh pada bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, kondisi ini juga berpengaruh pada kebersihan lingkungan mereka. Banyak yang masih kurang peduli terhadap kebersihan, sehingga membuang sampah rumah tangga pun dilakukan sembarangan, bahkan banyak yang membuangnya ke sungai.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada kondisi kawasan pemukiman Perumahan Nasional (Perumnas) Simalingkar Medan yang merupakan satu kawasan pemukiman yang cukup padat dengan penghuni sekitar 8.628 KK. Sampai saat ini sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga belum terkelola dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa sudut pemukiman, di selokan dan di pinggir/bantaran sungai bahkan di daerah aliran sungai yang ada pada pemukiman. Contoh lain adalah desa Jambangan sebelum dilakukan pembenahan oleh pemerintah Kota Surabaya. Saat itu, kondisi kampung ini dikenal kumuh, dengan pola pemukiman yang memanjang di bantaran sungai (kali Surabaya). Selain berbahaya, keadaan ini juga menciptakan lingkungan yang kurang baik karena pada bawah rumah atau tepi sungai jadi kotor akibat banyaknya sampah baik dari rumah tangga yang dibuang ke sungai atau sampah yang menyangkut pada tiang penyangga rumah.

Kondisi Perumnas Simalingkar dan desa Jambangan di atas merupakan salah satu potret kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kampung. Permasalahan - permasalahan yang terjadi di kampung berupa minimnya sarana prasarana, penataan kampung yang kurang tepat, perekonomian yang kurang sejahtera, dan perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan menjadikan lingkungan desa/kampung terlihat kumuh dan tidak terawat. Kondisi ini hanya salah satu potret perkampungan di Indonesia yang akan dijadikan sebagai data pembanding pada penelitian ini karena sangat dimungkinkan potret perkampungan ini juga terjadi pada daerah-daerah lain, salah satunya perkampungan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Lingkungan yang kurang bersih akibat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar dan sekeliling kampung/pemukiman di atas merupakan salah satu hal menarik untuk dikaji. Karena penumpukan sampah ini akhirnya akan dapat menimbulkan masalah antara lain masalah kebersihan/keindahan, kesehatan dan atau lingkungan hidup kota. Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki permasalahan akan pengelolaan sampah. Timbunan sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari (menlhk.go.Id, diakses Maret 2017).

Menurut Chandra (2006) penumpukan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sampah bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya. Sampah juga bisa menjadi sumber konflik sosial, karena bau sampah dan lingkungan yang kotor. Namun sampah juga bisa menjadi sumber mata pencaharian jika dikelola dengan benar.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum bisa mengatasi masalah-masalah di atas, karena perlakuan terhadap sampah masih memakai paradigma lama. Sampah – sampah yang dikumpul, akan diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa ada pengelolaan. Semakin lama, lahan tempat pembuangan sampah pun menjadi penuh dan sulit untuk mendapatkan lahan baru lagi.

Salah satu pendekatan permasalahan sampah adalah dengan menciptakan kampung daur ulang. Kampung daur ulang merupakan daerah yang diubah menjadi tempat dimana dilakukannya proses pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi, sehingga dapat menjadi kampung yang produktif, bersih dan sehat, dan ramah lingkungan, serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Pengelolaan sampah yang dilakukan,

bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah, serta mengubah bentuk sampah menjadi bernilai ekonomis melalui program 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.

Konsep Kampung Daur Ulang ini merupakan salah satu konsep yang ditawarkan untuk pembangunan berkelanjutan bagi kawasan perdesaan yang lagi gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini. Hal ini telah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut pada pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu. Dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut, diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat yang saling bekerjasama. Hal itu ditegaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam pembangunan desa, terutama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 ayat 1, bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu daerah pilihan yang akan diubah menjadi kampung daur ulang adalah Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan studi awal, masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak masih mengelola sampah secara konvensional dengan cara membakar dan membuang sampah sembarangan baik di halaman, di jalan, bahkan di sungai, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan lokasinya agak jauh dari kantor kecamatan. Mereka tidak mau membayar retribusi sampah, karena punya pemikiran bahwa sampah bisa dibakar atau dibuang ke tempat lain.

Sedangkan desa/kelurahan yang sudah lebih dekat dengan kota dan kantor kecamatan sudah mau membayar retribusi sampah. Sehingga sampah – sampah yang mereka kumpul diangkut oleh truk – truk pengangkut sampah yang disediakan oleh kecamatan setiap harinya. Sampah yang diangkut dari pemukiman tersebut dibuang ke TPS dan TPA terdekat. Namun

karena pengelolaan sampah belum maksimal, sampah-sampah tersebut bertumpuk dan bertumpuk dari hari ke hari yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat.

Karenanya, pada penelitian ini akan dilakukan pra studi bagaimana kelayakan wilayah desa di kecamatan tersebut untuk dijadikan kampung daur ulang yang ramah lingkungan, baik itu dilihat dari aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi.

2. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan masyarakat kecamatan Hampan Perak untuk mendukung rencana kampung daur ulang.
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat kecamatan Hampan Perak untuk mendukung rencana kampung daur ulang.
3. Mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Hampan Perak untuk mendukung rencana kampung daur ulang.

Pada dasarnya tujuan penelitian ini hanya mengidentifikasi beberapa desa yang berpotensi/berpeluang untuk dijadikan sebagai “Kampung Daur Ulang”, dan belum pada tahap kelayakan pembangunan kampung daur ulang. Ketika salah satu/beberapa desa yang terpilih berpotensi/berpeluang dijadikan sebagai kampung daur ulang, maka akan dihitung tingkat kelayakan pembangunan kampung daur ulang tersebut untuk penelitian selanjutnya (*sustainability research*).

3. Sasaran Penelitian

1. Bagi pemerintah; menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui konsep kampung daur ulang.
2. Bagi masyarakat; melalui hasil penelitian ini dapat menjadi kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi dan menjadikan lingkungan mereka sehat dan ramah lingkungan.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan kualitatif dan kuantitatif (*mix research*) yang sifatnya saling melengkapi. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner ke lapangan untuk melihat kondisi kampung/desa di Kecamatan Hampan Perak, sedangkan data sekunder berupa profil kecamatan diperoleh melalui studi dokumen yang datanya bersumber dari Indeks Desa

Membangun (IDM), BPS, Hampan Perak dalam Angka; dan Peraturan dan Perundang-Undangan.

Subjek penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Hampan Perak. Objek yang diteliti adalah kondisi eksisting perkampungan di Kecamatan Hampan Perak. Dari subjek penelitian tersebut dijadikan beberapa Informan penelitian, misalnya : Camat, Lurah, Kepala desa, Sekretaris desa, dan masyarakat setempat, sedangkan responden penelitian ini adalah masyarakat setempat. Jumlah masyarakat setempat yang dijadikan sebagai informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan data dan informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, studi dokumentasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Penentuan sampel penelitian sebagai responden untuk mengisi/menjawab kuesioner penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Sampel bertujuan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (a) masyarakat yang sudah bermukim di desa tersebut selama minimal 10 tahun; (b) berusia minimal 30 tahun; (c) Ibu/Bapak kepala keluarga; (d) bisa baca tulis atau tidak buta huruf; dan (e) memahami konsep “kampung daur ulang”. Dari jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria sampel di atas, maka diambil 10% untuk jumlah sampel penelitian.

Data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif, sedangkan data yang bersumber dari kuesioner dianalisis secara kuantitatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan deskriptif. Analisis data secara kuantitatif terkait sikap dan persepsi masyarakat akan upaya menciptakan kampung daur ulang dideskripsikan dengan menggunakan skala Likert.

Pemilihan desa/kampung yang dijadikan lokus penelitian dan akan dianalisa berdasarkan pada hasil dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, yakni desa yang berada pada klasifikasi Perdesaan. Klasifikasi perdesaan dianggap cukup potensial untuk dibangun secara berkelanjutan. Kemudian data tersebut akan disesuaikan dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016. Dari data IDM tersebut akan dipilih kategori status desa yang berada pada nilai IDM di atas lebih besar ($>$) dari 0,5989.

Nilai tersebut merujuk pada Desa yang Tidak Tertinggal (seperti Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri). Dari hasil penilaian pada tiap indikator untuk mendapatkan skor tersebut, maka sebagian besar desa di Kabupaten Deli Serdang memiliki status Desa Tidak Tertinggal. Kriteria ini akan menjadi prioritas utama dalam pra studi kelayakan menciptakan kampung daur ulang ini. Karena Desa Tidak Tertinggal dianggap Desa Potensial yang

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan analisa di atas, maka yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Kota Datar, Desa Kota Rantang, Desa Sialang Muda, dan Desa Tandem Hulu Satu. Desa - desa ini menjadi desa yang diharapkan cukup siap dalam menerima program – program pemerintah, yang nantinya bisa dilihat dan dijadikan contoh pada desa – desa lainnya.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kondisi Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak

Dalam kaitannya dengan program kampung daur ulang, yang menjadi modal suatu daerah untuk bisa melaksanakan program tersebut, adalah daerah yang memiliki modal sosial budaya, lingkungan dan ekonomi. Dengan menganalisa kondisi sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi di masing – masing lokasi penelitian, maka akan diketahui potensi masing – masing desa untuk bisa dijadikan *pilot project* program kampung daur ulang.

1. Kondisi Lingkungan Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak

Pemaparan kondisi lingkungan masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dilihat dari beberapa variabel, diantaranya: kondisi sampah di lingkungan sekitar dan keberadaan bank sampah.

Pertama, kondisi sampah di lingkungan sekitar. Kondisi timbunan sampah, baik volume dan persebarannya merupakan salah satu indikator ada atau tidaknya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga atau masyarakat di sebuah permukiman. Hampir semua warga yang tinggal di 4 desa sebagai lokasi penelitian melempar, menumpukkan dan/atau membakar sampah. Masyarakat menumpukkan sampah pada satu lubang dan membakarnya bila tumpukan sampah sudah melebihi dari volume lubang sampah yang digali. Beberapa masyarakat yang tinggal di Desa Sialang Muda dimana desanya dikelilingi aliran sungai melakukan pembuangan sampah dengan melempar sampah buangnya ke sungai. Pembuangan sampah ke sungai sering dilakukan oleh warga karena selain tidak adanya TPS di sepanjang jalan Desa Sialang Muda, juga karena alasan malas untuk membakar sampah. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai menjadikan lingkungan di sekitar aliran sungai tercemar dan jorok.

Berikut jawaban warga desa terkait cara mereka menangani sampah ketika peneliti melakukan wawancara kepada mereka.

“Masyarakat buang sampah ke sungai sudah jadi kebiasaan dari dulu, apalagi tidak ada tempat penampungan sampah (TPS) atau tong sampah. Beberapa masyarakat yang lain masih mau membakar sampah tapi asapnya dapat mencemari lingkungan atau polusi udara.”

Bagi masyarakat yang bermukim di Desa Kota Datar dan Kota Rantang sebagai desa persawahan, selain membakar sampah, juga membuangnya ke areal persawahan apalagi sampah-sampah organik yang dapat membusuk dan berfungsi sebagai pupuk tanaman di persawahan. Timbulan sampah yang ada di sekitar wilayah desa sebelum dibakar tidak hanya berasal dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga, tetapi juga sampah yang berasal dari dedaunan tumbuhan/tanaman di sekitar taman warga atau sampah yang datang dari lingkungan permukiman warga sekitar lainnya akibat terbawa angin atau ulah manusia yang kurang bertanggungjawab.

Keberadaan wilayah kampung di 4 desa sebagai lokasi penelitian yang berdekatan dengan sentra perekonomian khususnya usaha sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap jumlah sebaran dan volume timbulan sampah di wilayah kampung. Sampah yang banyak menumpuk selain dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat juga sebagian besar berasal dari sampah akibat aktivitas jual beli masyarakat sekitar. Banyaknya usaha sektor perdagangan di keempat desa memberikan dampak negatif terhadap jumlah persebaran dan volume sampah yang sebagian masih dibuang sembarangan di lingkungan sekitar desa.

Tipikal rumah kampung yang pada umumnya masih memiliki lahan kosong yang luas di depannya yang dijadikan sebagai pekarangan/taman, oleh sebagian warga menjadikan lahan kosong tersebut sebagai tempat pembuangan, penumpukan atau tempat pembakaran sampah. Perilaku membuang sampah secara spontan keluar rumah, terutama sampah dari sisa bahan yang konsumsi masyarakat sehari-hari seperti misalnya kertas atau plastik pembungkus makanan atau snack, kaleng atau botol minuman dan material sampah lainnya, menjadikan lingkungan sekitarnya jorok dan penuh dengan sampah. Tumpukan sampah di sekitar permukiman warga disebabkan oleh perilaku warga yang membuang sampah langsung tanpa diwadahi di sekitar rumahnya. Sebagian besar warga di 4 desa masih enggan untuk melakukan usaha pembersihan.

Kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik juga berkontribusi menjadikan wilayah kampung di 4 desa sebagai lokasi penelitian bau dan kumuh. Keberadaan usaha ternak sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di 4 desa memberikan kontribusi terhadap jumlah sebaran dan volume timbulan kotoran ternak sebagai sampah di wilayah kampung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga desa terkait pengelolaan

kotoran ternak, mereka menyatakan bahwa pengelolaan belum dilakukan secara profesional. Mereka menjual kotoran tersebut kepada pengepul untuk dibawa ke beberapa daerah seperti Berastagi untuk dijadikan sebagai pupuk kandang bagi tanaman. Pengepul kotoran ternak tidak mengambil kotoran ternak setiap hari, sehingga untuk beberapa hari sebelum kotoran tersebut diambil tertumpuk dan terkumpul di tempat kandang ternak, sehingga kondisi ini menyebabkan bau yang tidak enak bagi warga lain sekitarnya dan menyebabkan polusi udara.

Beberapa daerah pemukiman di 4 desa sebagai lokasi penelitian telah bersih dari timbunan dan tumpukan sampah. Selain pembersihan sampah yang dilakukan secara individu, pembersihan sampah yang mengumpul dengan jumlah sampah yang cukup banyak di beberapa titik ruang terbuka dilakukan warga dengan bergotong royong yang diorganisir oleh kepala dusun. Pembersihan secara bergotong-royong dilakukan oleh warga terutama pada momen-momen menyambut hari besar nasional atau jika akan diadakan lomba kebersihan yang semakin sering dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Camat Hampan Perak sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman.

Berikut jawaban warga desa serta kepala dusun terkait cara mereka untuk melakukan kebersihan lingkungan saat peneliti melakukan wawancara kepada mereka.

"Sampah-sampah yang ngumpul di sekitar sini kami adakan gotong royong untuk dibersihkan. Kita melakukan gotong royong dengan mengumpulkan warga untuk melakukan kebersihan lingkungan. Kepala dusun bersama warganya bekerja bersama-sama. Hal ini dilakukan saat menjelang hari-hari besar, misalnya menyambut bulan suci Ramadhan, idul fitri, atau hari besar lainnya."

Warga tidak memiliki alternatif pemusnahan atau pembuangan sampah yang standar sesuai dengan pengelolaan sampah permukiman. Perilaku memusnahkan sampah dengan cara membakar sampah jika cuaca dan kesempatan memungkinkan yang dilakukan di sekitar rumah atau areal pekarangan/taman bukanlah penanganan sampah yang baik, termasuk memusnahkan sampah dengan cara melemparkan atau membuang sampah ke sungai bahkan menumpukkan kotoran ternak selama beberapa hari untuk selanjutnya dijual.

Dampak dari pembuangan atau pemusnahan sampah yang dihasilkan warga sekitar sampai saat ini belum dirasakan mempengaruhi kehidupan warga di wilayah ini. Dimensi sungai yang sangat lebar, dengan arus yang cukup deras dan volume air yang cenderung stabil menjadikan bungkusan-bungkusan atau material sampah yang dibuang oleh warga menjadi sesuatu yang tampak tidak berarti dalam mengotori sungai sehingga perilaku pembuangan atau pemusnahan sampah di sungai terkesan sebagai perilaku yang tidak signifikan mengganggu kebersihan sungai. Bungkusan sampah yang di buang ke sungai pun tidak mengganggu aliran sungai seperti menyumbat aliran atau sebagai penyebab banjir.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh seseorang yang anonim, mengatakan bahwa dengan begitu banyaknya sampah yang menumpuk, maka dampak yang ditimbulkan pada lingkungan adalah: *pertama*, lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh, dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. *Kedua*, sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah. *Ketiga*, sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. *Keempat*, pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup, dan jauh dari pemukiman (<http://www.antaranews.com/berita/417287/produksi-sampah-plastik-indonesia-54-juta-ton-per-tahun>, Anonymous, 2006, diakses Mei 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa persoalan sampah terjadi bukan hanya karena kurangnya perhatian pemerintah tetapi lebih dari itu adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dimana dibutuhkan peran serta seluruh elemen dalam mengelola sampah sehingga terbentuk kota bersih yang berdampak baik bagi semua. Maka dari itu, masalah sampah ini tentunya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mewujudkan kota yang bersih dan sehat.

Kedua, keberadaan bank sampah. Masyarakat di 4 desa belum memiliki bank sampah. Adanya bank sampah memberikan perbaikan kebersihan lingkungan dan juga memberikan manfaat langsung dengan berkurangnya tumpukan sampah di lingkungan. Keberadaan bank sampah juga dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan dengan semakin berkurangnya warga yang membakar sampah.

Menurut Mujibuurahmad dkk (2014), partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah dapat mengurangi beban lingkungan mengenai bahaya sampah yang ada. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, memberikan bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan soal sampah yang terus meningkat. Menurut Purwanti *et al.* (2015) salah satu usaha yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan mewajibkan Kota/Kabupaten untuk mengadopsi konsep Bank Sampah sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian penghargaan lingkungan bagi Kota/Kabupaten yaitu Piala Adipura. Lalu adanya Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah sudah memberikan bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan masalah sampah.

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak

Faktor sosial budaya menjadi hal yang sangat penting diperhatikan dalam mendukung terciptanya kampung daur ulang. Sosial budaya merupakan modal dasar masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Faktor yang penting untuk diperhatikan pada kondisi sosial budaya adalah yang terkait dengan kemampuan dan modal dasar masyarakat di lokasi penelitian dalam mendukung terciptanya kampung daur ulang.

Pemaparan kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Hamparan Perak ditinjau dari beberapa variabel, yaitu: sistem sosial dan budaya masyarakat; aktivitas rutin tenaga kerja; keterlibatan individu atau kelompok dalam mengambil keputusan; pranata sosial kelembagaan masyarakat; keberadaan situs budaya; dan kepadatan penduduk.

Pertama, sistem sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di lokasi penelitian tidak signifikan pada beberapa tahun terakhir. Di masing – masing lokasi penelitian terlihat bahwa mobilitas penduduk cukup rendah, dengan tidak banyaknya perubahan jumlah penduduk, selain karena kelahiran dan kematian. Kondisi ini menjadi poin penting juga dalam pembangunan terkait kampung daur ulang, mengingat perlunya keberlanjutan program ini, sehingga perlu adanya kestabilan dalam struktur penduduk.

Kondisi sosial kemasyarakatan di 4 desa tersebut sebagai lokasi penelitian dirasakan terjalin erat dalam hubungan atau interaksi antar masyarakat. Interaksi sosial yang ada di lokasi penelitian masih cukup baik, meski berbeda – beda agama dan suku. Pola kerjasama yang dilakukan biasanya pada acara – acara pesta dan adat, baik acara sukacita, maupun dukacita. Selain itu juga adanya gotong – royong yang dilakukan sesekali, baik itu membersihkan lingkungan, perbaikan jalan, maupun acara panen di sawah yang merupakan ritual adat masing – masing suku, seperti Banjar dan Jawa. Di Kota Rintang misalnya, ada beberapa ritual adat yang masih dilakukan oleh masyarakat disana, seperti ‘Turun Bibit’ yang merupakan gotong royong masyarakat di sawah, ‘Ayun Massal’, ‘Ketupatan’, dll.

Kegiatan – kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan saling bantu diantara masyarakat. Meski demikian, menurut pengakuan kepala desa Kota Rintang, semangat gotong royong tersebut sudah mulai pudar karena masalah ekonomi dan perubahan

masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Akibatnya, rasa kebersamaan dan gotong royong tidak se-semangat dahulu lagi.

Sedangkan konflik sosial tidak menjadi hal yang di-kawatirkan di desa – desa tersebut. Dari wawancara yang dilakukan terhadap Kepala desa, sekretaris desa, pegawai desa lainnya, serta masyarakat, ditemukan bahwa tidak ada konflik sosial yang perlu dikhawatirkan di tempat mereka. Konflik yang terjadi hanya masalah kecil, misalnya antara tetangga.

Musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan merupakan wujud nyata terjalinnya hubungan diantara mereka. Dengan kesibukan satu sama lainnya, para warga sering melakukan komunikasi dan interaksi melalui musyawarah di malam hari, dengan pertimbangan bahwa malam hari tentunya tidak mengganggu aktivitas kesibukan warga. Interaksi masyarakat berupa pertemuan warga baik formal dan informal cukup sering dilakukan oleh warga untuk membahas permasalahan-permasalahan sosial atau sekedar membicarakan permasalahan keseharian mereka.

Dalam konteks pengelolaan sampah permukiman, inisiatif untuk menangani sampah permukiman secara bersama-sama melalui gotong royong belum nampak kemunculannya secara signifikan. Pembersihan kampung dari sampah dilakukan hanya dalam momen-momen tertentu seperti penyambutan ulang tahun kemerdekaan, penyambutan bulan suci Ramadhan dan idul fitri, atau menyambut perlombaan-perlombaan kampung yang sering diadakan oleh Pemerintah Kabupaten atau pemerintah kecamatan.

Aspek sosial dalam pembentukan perilaku individu maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang mampu mempengaruhi baik positif maupun negatif terhadap individu maupun masyarakat dalam mengelola sampah permukiman. Pemahaman masyarakat dalam masalah kebersihan dapat dinilai cukup baik walaupun cara yang digunakan untuk menjaga kebersihan itu sendiri belum tepat. Fenomena pembuangan sampah baik di sungai atau di pekarangan serta penumpukan dan pembakaran sampah merupakan perilaku sosial sebagai usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan, namun dengan cara membakar, membuang ke sungai atau ke sawah serta menumpukkannya bukanlah cara pengelolaan sampah yang baik.

Dalam kesehariannya, budaya masyarakat untuk menjaga kebersihan di 4 desa tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungan desa seperti: areal persawahan, aliran sungai, dan/atau daerah perkebunan sebagai bagian dari lingkungan tempat tinggal dan sebagai bagian dari aktivitasnya. Pembuangan, pembakaran, serta penumpukan sampah di luar atau di sekitar halaman rumah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat yang secara terus menerus

berlanjut dan tidak perlu ditiru. Dalam hal pemusnahan sampah, perilaku warga dalam melaksanakan proses pemusnahan juga mendapatkan pengaruh dari keberadaan sungai sebagai bagian dari lingkungan permukimannya. Anggapan sungai sebagai tempat sampah yang selama ini di persepsikan oleh warga memicu warga untuk terus melakukan pemusnahan sampah di tempat tersebut.

Hasil analisis kondisi sosial budaya masyarakat sebagai pembentuk perilaku pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap sampah adalah sebagai bahan atau material buangan yang sulit untuk dimanfaatkan kembali. Hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor kreativitas untuk memanfaatkan sampah yang masih layak digunakan, termasuk dukungan informasi terhadap pemanfaatan sampah.

Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingginya aktivitas rutin pekerjaan, bahkan tidak sedikit warga yang memiliki pekerjaan lebih dari satu bidang pekerjaan menyebabkan adanya kecenderungan kurangnya waktu untuk aktivitas interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat berfungsi sebagai forum non formal terhadap pengembangan atau perbaikan kampung khususnya masalah persampahan permukiman.

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pegawai di ibu kota Kecamatan Hamparan Perak, pedagang kaki lima di pusat-pusat pasar perbelanjaan, serta buruh, petani, peternak dan berkebun di daerah pinggiran areal persawahan, secara tidak langsung mempengaruhi pola pengelolaan sampah di wilayah ini. Pekerjaan dengan intensitas waktu bekerja yang cenderung tanpa adanya hari libur menjadikan perhatian masyarakat kepada permasalahan sampah di lingkungan tempat tinggalnya memiliki porsi yang cukup rendah.

Pengelolaan sampah pada konsep kampung daur ulang merupakan konsep mengumpulkan dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian membawanya ke bank sampah untuk ditabung. Bank sampah ini dijalankan dengan menunjuk masyarakat sebagai tenaga operasionalnya, yang ditugaskan dan diberikan gaji dari retribusi yang diambil, mengingat warga telah memiliki rutinitas pekerjaan masing-masing. Namun, bisa juga dijalankan oleh masyarakat yang memiliki komitmen dalam pengelolaan sampah dengan inisiatif sendiri.

Tingginya aktivitas rutin masyarakat di 4 desa sebagai lokasi penelitian berkontribusi positif pada tingkat kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, seperti pengolahan sampah serta keikutsertaan berpartisipasi pada program kampung daur ulang. Kesempatan adalah peluang yang dimiliki oleh masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan kampung daur ulang. Tingkat kesempatan warga diukur dari banyaknya waktu luang pada jam kerja yang dimiliki oleh masyarakat.

Ketersediaan waktu luang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat yang berjenis kelamin perempuan. Pada umumnya, wanita di 4 desa hanya bekerja sebagai *part time*, bekerja paruh waktu sambil mengisi waktu luang mereka, sementara para suami telah bekerja menetap yang sulit dibagi waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah pada konsep kampung daur ulang.

Ketiga, keterlibatan individu atau kelompok dalam mengambil keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan di lokasi penelitian pada umumnya sama. Pada saat ada program pemerintah atau persoalan desa, pemerintah desa akan memanggil dan mensosialisasikan program dan membicarakan persoalan desa dengan memanggil tokoh masyarakat, berupa: tokoh agama, dan tokoh pemuda di desa tersebut. Setelahnya masing – masing tokoh tersebut akan memberikan penjelasan kepada masyarakat di desa – desa tersebut, tokoh masyarakat cukup berpengaruh dan didengar oleh masyarakat.

Disamping itu, dalam kaitannya dengan kebersihan lingkungan, peranan individu atau kelompok sebagai pihak inisiator dalam menggerakkan warga untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di 4 desa ini dapat dirasakan kemunculannya walaupun belum maksimal keterlibatannya. Keempat desa memiliki tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama tersebut yang dapat menggerakkan masyarakat umum dalam mengelola sampah di rumahnya masing – masing serta di lingkungan desanya.

Selain tokoh-tokoh agama di atas, keempat desa sebagai lokasi penelitian juga memiliki kelompok organisasi sosial yang secara non formal terbentuk, misalnya: perwiritan, serikat tolong menolong (STM), pengrajin, dan bilal mayyit. Perlibatan kelompok organisasi sosial ini dalam permasalahan pengelolaan sampah yang bersifat kontinu merupakan kendala bagi mereka. Hal tersebut dikemukakan dengan alasan bahwa masing-masing individu dalam kelompok ini telah memiliki rutinitas pekerjaannya. Artinya, pola penanganan permasalahan sampah pelaksanaannya bersifat temporer sehingga tidak dapat ditangani dengan tidak mengganggu rutinitas pekerjaannya secara signifikan.

Kepemimpinan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama serta ketua kelompok organisasi sosial di 4 desa kurang memiliki kemampuan dalam mendorong warganya agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Hal ini dapat dilihat dari adanya kepentingan individu di atas kepentingan kelompok.

Menurut Fadli (2010), keberadaan fungsi-fungsi kepemimpinan merupakan kekuatan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan dua elemen yang memiliki keterkaitan yang erat. Kepemimpinan yang tidak mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat tidak akan membawa proses pembangunan

mencapai hasil secara maksimal. Demikian juga sebaliknya, partisipasi masyarakat akan minim tanpa adanya peran kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam membangun konsep kampung daur ulang berdasarkan partisipasi masyarakat, kepemimpinan tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah, minimal sampah rumah tangga.

Dari deskripsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat ini memiliki ketertarikan yang rendah dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan desanya. Interaksi masyarakat untuk membangun pengelolaan sampah yang masih terkendala dengan kepentingan pribadi warga, sanksi yang belum dapat diberlakukan untuk masyarakat yang tidak mengelola sampahnya dan tidak adanya individu atau kelompok masyarakat yang mampu menggerakkan warga untuk menciptakan kebersihan kampung secara maksimal dan berkelanjutan.

Bentuk kebersamaan dalam penanganan permasalahan sampah permukiman merupakan tujuan dari pembinaan-pembinaan yang sering dilaksanakan baik oleh aparat kecamatan atau pihak terkait dalam permasalahan kebersihan dan sampah lingkungan permukiman. Pertimbangan atau asumsi bahwa warga memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan sampah secara swadaya dan keterbatasan sarana prasarana aparat daerah adalah latar belakang kegiatan pembinaan untuk menumbuhkan keswadayaan pengelolaan sampah yang bersifat *bottom-up*.

Tujuan positif dari upaya pembinaan masyarakat seperti dijelaskan tersebut di atas sangat tergantung dari budaya dan karakteristik masyarakat yang akan dijadikan sasaran pembinaan. Karakteristik masyarakat wilayah pedesaan yang merupakan lingkungan warga kampung memiliki kecenderungan yang rendah dalam mengorganisir kegiatan yang melibatkan warga kampung, terlebih kegiatan yang bersifat kontinu, seperti pengelolaan sampah. Dalam beberapa kegiatan gotong royong yang bersifat temporer untuk membersihkan timbulan sampah di beberapa tempat di wilayah kampung, sering hanya dihadiri oleh warga yang tetap atau tertentu atau hanya beberapa warga yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Masyarakat memiliki potensi dalam perbaikan kampung, terutama menyangkut perbaikan pengelolaan sampah, akan tetapi kondisi sarana dan prasarana persampahan yang belum disediakan mengakibatkan masyarakat masih berperilaku sembarangan dalam mengelola sampah yang dihasilkannya. Warga lebih cenderung menerima dengan pasif pengelolaan sampah di wilayah ini, jika retribusi tidak memberatkan mereka akan mengikuti pengambilan sampah secara komunal akan tetapi jika retribusi dirasakan memberatkan warga

akan menolak ikut pengambilan sampah tersebut dan mengelola sampah yang dihasilkannya seperti saat ini.

Keempat, pranata sosial kelembagaan masyarakat. Pranata sosial kelembagaan masyarakat pada penelitian ini adalah layanan pendidikan, baik SD, SMP, SMA/SMK atau sekolah madrasah di 4 desa sebagai lokasi penelitian. Sekolah sebagai tempat masyarakat untuk menggali informasi dan pengetahuan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat agar memiliki pengetahuan, kemampuan serta keterampilan dalam mengelola sampah untuk bisa dijadikan sesuatu yang berharga dan bernilai jual. Kemampuan adalah daya yang dimiliki masyarakat sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah-sampah lainnya.

Layanan pendidikan sebagai pranata sosial kelembagaan masyarakat berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian. Dalam konteks pengolahan sampah pada konsep kampung daur ulang, keterampilan masyarakat pada penelitian ini lebih kepada pemilihan sampah dan keterampilan dalam memanfaatkan sampah menjadi pupuk maupun menjadi kerajinan melalui daur ulang sampah plastik. Keterampilan memilah sampah merupakan kegiatan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.

Dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, sampah dipisahkan menjadi sampah organik, sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan (sampah bungkus kopi, sampah bungkus deterjen, botol plastik dan kertas), sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan (sampah diapper), dan sampah yang berbahaya atau disebut sampah B3 (barang-barang pecah belah). Untuk Keterampilan masyarakat juga mencakup pengolahan sampah-sampah organik menjadi pupuk kandang serta sampah-sampah anorganik menjadi barang kerajinan yang bernilai, seperti: kupu-kupu, tas, gelang dan lain sebagainya.

Kelima, keberadaan warisan budaya atau situs purbakala. Dari 4 desa sebagai lokasi penelitian, maka hanya Desa Kota Rantang yang memiliki warisan budaya atau situs purbakala, sementara ketiga desa lainnya tidak memilikinya. Lokasi situs budaya di Kota Rantang berada sekitar 15 kilometer barat laut Medan, dengan waktu tempuh dari kota Rantang menuju ke lokasi sekitar 1 jam perjalanan. Lokasi situs berada di daerah pelosok yang jauh dari pemukiman warga. Lokasi situs budaya dikelilingi oleh sawah-sawah atau ladang masyarakat yang memang masih difungsikan warga untuk bercocok tanam. Infrastruktur jalan menuju lokasi adalah jalan tanah dengan tidak beraspal.

Keberadaan situs budaya di Kota Rantang, dimana jarak lokasinya masih jauh dari ibukota desa Kota Rantang, tidak akan mengganggu konsep kampung daur ulang. Begitu juga

konsep kampung daur ulang tidak akan mengganggu keberadaan situs. Hal yang perlu dipikirkan yang tidak hanya masyarakat saja akan tetapi juga pemerintah adalah bagaimana sarana dan fasilitas lainnya di situs/warisan budaya ini bisa lebih baik.

Perpaduan situs budaya dengan konsep kampung daur ulang dimaksudkan agar wilayah kampung tersebut juga dijadikan oleh masyarakat umum sebagai wisata alam dan wisata budaya sekaligus dijadikan sebagai lokus penelitian-penelitian di bidang arkeologi.

Keenam, kepadatan penduduk kaitannya dengan pengolahan sampah. Jumlah penduduk sangat berkontribusi terhadap jumlah sampah yang dihasilkan yaitu dari perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data dokumen, dapat dijelaskan bahwa Kota Datar merupakan kota yang paling berpeluang untuk menghasilkan sampah terbanyak dibanding dengan ketiga desa lainnya, urutan selanjutnya adalah Kota Rantang, Tandam Hulu 1, dan Sialang Muda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang dimiliki pada masing-masing daerah tersebut. Bila dilihat dari kepadatan penduduk, maka kemungkinan jumlah sampah per 1 Km² yang paling banyak menghasilkan adalah Desa Sialang Muda, kemudian urutan selanjutnya adalah Kota Rantang, Kota Datar, dan Tandam Hulu 1.

Banyaknya jumlah dan tingginya kepadatan penduduk berkontribusi terhadap banyaknya volume timbulan sampah yang memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, persawahan, perkebunan, serta daerah aliran sungai.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Seiring dengan jumlah dan tingginya kepadatan penduduk serta pertumbuhan ekonomi, saat ini seharusnya pengelolaan sampah di 4 desa harus sudah dilakukan secara profesional, dan bukan dimusnahkan dengan cara-cara tradisional seperti membakar, menumpukkan dan/atau menghanyutkannya ke sungai atau sawah. Bila sampah tidak dikelola dengan baik, sementara dari tahun ke tahun jumlah dan kepadatan penduduk selalu bertambah, maka lambat laun sampah menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Timbunan sampah yang tidak terkendali terjadi sebagai konsekuensi logis dari aktivitas manusia dan industrialisasi, yang

kemudian berdampak pada permasalahan lingkungan perkotaan seperti keindahan kota, kesehatan masyarakat, dan lebih jauh lagi terjadinya bencana (ledakan gas metan, tanah longsor, pencemaran udara akibat pembakaran terbuka dan lain sebagainya).

Untuk mengatasi persoalan sampah akibat jumlah dan kepadatan penduduk di atas, selain program KB untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah lebih pada Integrated Test Facility (ITF) atau pengelolaan secara terpadu, pembangunan bank sampah serta menggalakkan kampanye budaya bersih.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak

Faktor yang sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di lokasi penelitian adalah jenis pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Pekerjaan sangat penting dianalisis untuk menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang ada di empat desa yang menjadi fokus penelitian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan data dokumen, mata pencaharian masyarakat di empat desa lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, pada umumnya diketahui sebagai bertani, berdagang, serta buruh. Pekerjaan lain – lain tersebut merupakan jumlah penduduk yang tidak bekerja dan pekerjaannya tidak permanen atau tidak jelas. Dari kondisi perbedaan mata pencaharian masyarakat tersebut, menunjukkan adanya perbedaan kondisi perekonomian masyarakat di masing – masing desa lokasi penelitian. Meski secara umum dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian masyarakat tersebut masih perlu peningkatan.

Beberapa warga masyarakat harus melakukan pekerjaan ganda untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Biasanya pekerjaan ganda dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, disamping harus melakukan pekerjaan rumah tangga, para warga ibu harus bekerja lain sebagai *part time* misalnya: pembantu rumah tangga, kerja pabrik, dan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak terlalu menuntut pengetahuan dan keterampilan khusus.

Pada dasarnya, pendapatan warga ada yang bersifat bulanan, harian atau mingguan. Sebagai misal: masyarakat yang tinggal di Desa Tandam Hulu 1 yang mayoritas karyawan perkebunan, mereka gaji 2 kali sebulan, atau warga yang bekerja serabutan atau pekerjaan tidak menetap tentunya memperoleh gaji harian. Warga sebagai pegawai, baik PNS atau swasta tentunya memperoleh gaji bulanan. Dengan pendapatannya yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Hasil pendapatan warga pada umumnya hanya pas-pasan atau hanya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari mereka, apalagi warga tersebut memiliki anak yang masih tanggungan sekolah.

Keterkaitan hasil pendapatan warga yang pas-pasan seperti yang dijelaskan di atas, konsep kampung daur ulang selain menjadikan kampung bersih dan tertata, akan tetapi juga dapat menambah penghasilan warga dengan memanfaatkan sampah sebagai sesuatu yang bernilai. Ketika peneliti mewawancarai warga terkait tanggapan mereka akan konsep kampung daur ulang, maka pada prinsipnya mereka sangat mendukung konsep ini sepanjang dapat memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka.

b. Penentuan Prioritas Lokasi Penelitian Menjadi Kampung Daur Ulang

Dalam menentukan prioritas pilihan desa yang layak menjadi kampung daur ulang, penelitian ini mendasarkan pada studi dokumentasi dan hasil observasi. Studi dokumentasi dan observasi dilakukan pada: administratif desa (berupa klasifikasi, status, topografi desa, dan jumlah penduduk), pranata sosial/kelembagaan masyarakat, dan fasilitas dan sarana prasarana desa (berupa kondisi jalan, jumlah angkutan umum, keberadaan sekolah, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan, pola penggunaan lahan, serta kondisi sampah dan lingkungan di desa). Selain itu juga, penentuan lokasi yang layak untuk dijadikan kampung daur ulang adalah bagaimana sikap dan persepsi masyarakat terhadap upaya menciptakan kampung daur ulang terkait sosial budaya, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Hasil analisa yang dilakukan terhadap semua indikator di atas, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Urutan pilihan prioritas lokasi kampung daur ulang berdasarkan analisis dokumentasi dan kuesioner

NO	Indikator	Kota Datar	Kota Rantang	Sialang Muda	Tandem Hulu Satu
1.	Klasifikasi desa	Perdesaan	Perdesaan	Perdesaan	Perdesaan
2.	Status desa	Tidak tertinggal	Tidak tertinggal	Tidak tertinggal	Tidak tertinggal
3.	Topografi/tipologi desa	Desa persawahan	Desa persawahan	Desa aliran sungai	Desa perkebunan
4.	Jumlah penduduk	7.207	5.752	1.862	4.053
5.	Volume sampah (M3/hr)	2.882,8	2.300,8	744,8	1.621,2
6.	Kelompok sosial	58	61	17	23
7.	Organisasi kemasyarakatan	29	21	9	12
8.	Akses jalan (Km)	39	7	4	35
9.	Sarana angkutan	1.696	1.760	235	1.298
10.	Jumlah sekolah	7	8	3	6
11.	Jumlah sarana kesehatan	6	3	2	9
12.	Pola penggunaan lahan (%)	73,46	118,81	84,6	86,22
14.	Sikap dan persepsi masyarakat terkait sosial budaya	4,53 (sangat baik)	4,33 (Baik)	4,48 (Baik)	3,93 (Baik)
15.	Sikap dan persepsi masyarakat terkait ekonomi	4,59 (sangat baik)	4,28 (Baik)	4,45 (Baik)	3,84 (Baik)
16.	Sikap dan persepsi masyarakat terkait lingkungan	4,51 (sangat baik)	4,56 (sangat baik)	4,49 (baik)	4,36 (Baik)
17.	Sikap dan persepsi masyarakat	4,54	4,51	4,42	4,36

	terkait kesehatan masyarakat	(sangat baik)	(sangat baik)	(Baik)	(Baik)
13.	Kondisi lingkungan	Tidak memiliki bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah. Sebagian besar masyarakat masih mengumpulkan dan membakar sampah sendiri. Belum memiliki kader lingkungan.	Tidak memiliki bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah. Sebagian besar masyarakat masih mengumpulkan dan membakar sampah sendiri. Sudah memiliki kader lingkungan, namun belum aktif, hanya sebatas SK.	Tidak memiliki bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah. Sebagian besar masyarakat masih mengumpulkan dan membakar sampah sendiri. Sudah memiliki kader lingkungan, namun belum aktif, hanya sebatas SK.	Tidak memiliki bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah. Sebagian besar masyarakat masih mengumpulkan dan membakar sampah sendiri. Sudah memiliki kader lingkungan, namun belum aktif, hanya sebatas SK.
14.	Keberadaan kader lingkungan	Tidak ada	15 orang, namun tidak aktif	15 orang, namun tidak aktif	10 orang, namun tidak aktif

6. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan adalah:

- a. Kondisi lingkungan di lokasi penelitian masih terlihat kotor, karena sampah yang berasal dari rumah tangga, kotoran ternak, aktivitas jual beli dan tumbuh – tumbuhan yang tidak rapi, masih berserakan. Desa – desa yang menjadi lokasi penelitian memiliki karakteristik berbeda – beda, ada yang desa persawahan, desa perkebunan, dan desa aliran sungai. Semua lokasi penelitian belum memiliki bank sampah maupun kader lingkungan yang aktif. Perilaku masyarakat dalam hal sampah masih membuang dan membakar sampah, tanpa ada pengelolaan.
- b. Kondisi sosial budaya di lokasi penelitian masih memiliki interaksi yang cukup erat antara masyarakatnya. Ritual budaya masih dilakukan bersama – sama, dan masih adanya gotong royong dan saling bantu, meski hal itu tidak rutin lagi dilakukan. Tokoh masyarakat cukup berpengaruh di lokasi penelitian, sehingga pemerintah desa pada umumnya meminta tokoh masyarakat untuk menjembatani program pemerintah dengan masyarakat. Namun, peran tokoh masyarakat belum terlalu kuat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.
- c. Kondisi ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Mata pencaharian masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya bertani, berdagang, dan buruh. Beberapa ibu rumah tangga harus membantu keluarga dalam mencari nafkah. Para kepala keluarga pun banyak yang memiliki lebih dari satu pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- d. Prioritas desa yang memiliki pemenuhan optimal terhadap syarat dan kondisi terciptanya sebuah kampung daur ulang secara berurutan, adalah: 1). Desa Kota Datar, 2). Desa Kota Rantang, 3). Desa Sialang Muda, dan 4). Desa Tandem Hulu Satu.

7. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi:

1. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan pelatihan pengelolaan sampah baik terhadap peserta didik di sekolah; masyarakat umum; dan ibu-ibu PKK.
2. Pemerintah desa perlu membentuk kader lingkungan bagi desa yang belum memilikinya sama sekali dan mengaktifkan kembali kader lingkungan yang ada, serta menyediakan bak – bak sampah dan tempat pembuangan sampah.
3. Masyarakat atas inisiasi dan binaan pemerintah perlu membentuk kelompok masyarakat untuk membangun bank sampah yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat di sekitarnya.

4. Pemerintah kabupaten perlu melakukan pembinaan kader lingkungan dan menyediakan motivator yang bertugas mendampingi masyarakat dalam mengelola lingkungan desa.
5. Pemerintah perlu mengadakan kompetisi desa atau dusun dalam hal kebersihan dan keindahan, serta pengelolaan sampah, dan memberikan intensif secara rutin agar menjadi motivasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah.
6. Perlunya dikeluarkan Perda terkait lingkungan untuk fokus terhadap masalah pengelolaan sampah
7. Perlu adanya penelitian lanjutan terhadap studi kelayakan desa menjadi kampung daur ulang.

Daftar Pustaka

Buku

Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC.

Crawford, J.H., 2003. Pengomposan Limbah Padat Organik. Bogor: Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia.

Hadiwiyoto, S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Idayu.

Hasbullah, J., 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.

Koentjaraningrat. 1977. Penulisan Laporan Penelitian Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.

Lukman, Ali, et.al. 1995. Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Murtadho, D., dan S. E. Gumbira. 1988. Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat. Jakarta: PT. Melton Putra.

Landis, Paul H. 1948 Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Purwendro. S. dan Nurhidayat. 2006. Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik. Seri Agritekno. Jakarta: Penebar Swadaya.

Soemarwoto, Otto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Suprihatin, 2006. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Semarang: Mitra Ilmu.

Suwandi. 2005. Agropolitan. Merentas Jalan Meniti Harapan.

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Widyatmoko, Sintorini. 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah. Jakarta: Abadi Tandır.

-----, 2010. Unilever Green and Clean “Bumi Kita”. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.

Tesis dan Skripsi

Aryenti. 2011. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracondong Bandung. *Skripsi*. Pusat Litbang Permukiman Bandung.

Dani Abdurrahman Basyir. 2008. Evaluasi Keberlanjutan Masyarakat Desa Di Daerah Aliran Sungai Cisadane Menuju Ecovillage. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Fadli GM. 2010. Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Pembangunan Kesehatan di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat). *Tesis*. Bogor (ID): Mayor Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Purwanti Wuri, Sulistiyoroni, dkk. 2015. Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Malang: Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Slamet, J.S. 2004. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suryono dan Budiman. 2010. Sistem 3R. Institut Teknologi Bandung.

Jurnal

Aprizal Ramadhani & Ahmad Perwira Mulia Tarigan. Studi Pengelolaan Sampah Pasar Kota Medan. *Jurnal*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. 2010. Kajian Peluang Bisnis Rumah Tangga Melalui Pengelolaan Sampah Anorganik di Kota Medan. *Jurnal Inovasi*. Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Undang – Undang dan Peraturan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.

Website

Moningga, L. 2000. Community Participation in Solid Waste Management. <http://www.waste.nl>. [Diakses 16 Mei 2017].

(<http://www.antaranews.com/berita/417287/produksi-sampah-plastik-indonesia-54-juta-ton-per-tahun>, Anonymous, 2006, diakses Mei 2017